

VOX POPULI

Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

ISSN 2087-3360 eISSN 2714-7657

DEMOKRASI DAN KONFLIK

Jejaring Intelektual Jesuit dalam Membangun Semangat Kebangsaan dan Politik di Indonesia

Awal Muqsith

1-16

Post-Democracy: Prospek Demokrasi Lokal Kabupaten Gowa Pasca Pilkada Serentak 2020

Muh. Wahyu, Muh. Nur Yamin Firdauzi Harapap,

Muh. Adi Daya Pandu Buana, Febrianto Syam

17-26

Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba

Rana Dwi Puti Alham, Wiwi Wijayanti, Miftahul Jannah,

Reskiyanti Nurdin, Zulfiani

27-38

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pangkajene dan Kepulauan Tanun 2020

Nita Vibrianti, Nurul Islamia Aulia, Nurul Sahfitri, Syahrir Karim

39-47

Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto

Mursalim Muttar, Dewi Riskawati Hamzah,

Muh. Idris Syam, Anggriani Alamsyah, Nur Utaminingsih

48-56

Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto

**Musalim Muttar, Dewi Riskawati Hamzah,
Muh. Idris Syam, Anggriani Alamsyah, Nur Utaminingsih**
Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar
e-mail: mursalimmuttar01@gmail.com

Abstrak

Penelitian kami membahas tentang dampak perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh dari observasi, studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa hadirnya perusahaan PLTU di Kabupaten Jeneponto menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang mendapat manfaat dari pembangunan PLTU, memiliki sikap yang pro. Sementara masyarakat yang dirugikan justru menolak kehadiran PLTU. Namun sesuai fakta lapangan bahwa hadirnya PLTU secara perlahan membunuh perekonomian masyarakat setempat karena sangat berdampak buruk pada ekosistem laut yang sebagian masyarakat menggantungkan hidup mereka di sana.

Kata Kunci :

PLTU, Dampak Lingkungan, Peran Pemerintah, Jeneponto

PENDAHULUAN

Salah satu pembangkit listrik yang bertenaga uap terletak di Kabupaten Jeneponto. Keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) disambut antusias oleh masyarakat setempat dikarenakan tercipta banyak lapangan kerja, terutama sebagai buruh bangunan. Begitupun terkait pembebasan lahan, di mana tanah-tanah di area sekitar pembangunan PLTU yang biasanya dijual dengan harga murah, kini mendapatkan ganti rugi setelah pembebasan lahan dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga biasanya. Namun setelah PLTU resmi beroperasi, masalah kemudian muncul. Seba-

gaimana diketahui bahwa PLTU ini menggunakan bahan bakar utama berupa batu bara dengan tingkat polusi sangat buruk. Sehingga polusi dapat mencemari lingkungan yang berimbas pada menurunnya pendapatan nelayan, kualitas udara akibat pencemaran yang dapat mengganggu pernafasan serta kualitas rumput laut juga ikut menurun yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sering mengeluhkan aktivitas pengangkutan batu bara yang lalu lalang begitupun debu-debu yang ditimbulkan. Meskipun jarak PLTU dengan pesisir agak jauh,

tetapi debu itu sampai ke pantai bahkan ke rumah-rumah masyarakat. Begitupun penurunan kualitas rumput laut yang diakibatkan oleh lalu lalang kapal pengangkut batu bara apalagi kapal pengangkut yang hampir keseluruhan berbahan baja ini menyalurkan panas ke air laut. Rumput laut akan mati jika terkena panas yang berlebih. Sehingga para petani rumput laut menggunakan bibit tertentu untuk bisa mendapatkan pendapatan meskipun tidak sama lagi dengan dahulu sebelum ada PLTU.

Kami tertarik meneliti ini karena kebanyakan masyarakat pesisir di daerah Jeneponto, khususnya di Kelurahan Pantai Bahari menggantungkan nasibnya pada laut, baik sebagai petani rumput laut maupun sebagai nelayan penangkap ikan. Dengan kehadiran PLTU, kami ingin melihat sejauhmana dampak yang ditimbulkan serta bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang diakibatkan oleh beroperasinya PLTU.

KAJIAN PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang kami dilakukan. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Melinda Paula Tumbol dengan judul *Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten*. Penelitian Melinda bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan pembangunan PLTU terhadap beberapa aspek kehidupan

baik, aspek sosial maupun aspek ekonomi masyarakat desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa dari aspek sosial umumnya masyarakat desa memiliki perkembangan penduduk yang tergolong tidak stabil, selain itu dampak yang ditimbulkan pembangunan PLTU berimbas pada kesehatan masyarakat sekitar, contohnya aktivitas PLTU yang menyebabkan banyak debu sehingga menimbulkan gangguan pernafasan dan mengakibatkan mata menjadi perih. Namun di samping dampak yang telah ditimbulkan perusahaan PLTU juga memberikan bantuan berupa pengobatan gratis lewat program *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada masyarakat desa. Untuk dampak ekonomi, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan semakin kesulitan mendapatkan ikan semenjak adanya pembangunan PLTU hal ini disebabkan karena kondisi air di pesisir sudah tercemar, namun berbeda dengan masyarakat yang bekerja sebagai pedagang yang justru mendapat banyak keuntungan apalagi warga sekitar bisa menyewakan rumah bagi karyawan PLTU yang berasal dari luar kecamatan.¹

Penelitian Wiji Tri Wahyuni dengan judul penelitian *Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masya-*

¹Melinda Paula Tumbol, "Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten", *Skripsi* (Serang:Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015), h. 148-149.

rakat Nelayan Di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Penelitian ini berusaha menjelaskan dampak yang kehadiran PLTU di Cilacap. Perbedaan mendasar penelitian Wiji dengan Melinda terletak pada relasi antara masyarakat di desa dengan pengelola PLTU. Secara umum dalam penelitian Wiji dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek ekonomi, pembangunan PLTU memiliki dampak positif dengan berkurangnya angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Bunton. Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat adalah aktivitas nelayan menjadi terganggu sebab pembangunan PLTU mengakibatkan wilayah penangkapan ikan tergeser, yang secara otomatis menyebabkan pendapatan para nelayan menjadi menurun.²

Penelitian Bayu Aji Prakoso, Dewi Ros-tyaningsih, Sundarso dan Aufarul Marom dengan judul *Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.* Penelitian ini membahas tentang dampak lingkungan sampai kepada rana geografis daerah tersebut. Sekain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan PLTU ini membuat masyarakat mendapatkan sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi negatif yang di timbulkan adalah berkurangnya pendapatan para nelayan yang disebabkan

oleh keberaaan PLTU dan menimbulkan penyakit gatal-gatal. Adapun beberapa dampak geografis antara lain intensitas hujan berkurang dan udara menjadi panas yang diakibatkan oleh PLTU tersebut. Penulis juga mengungkapkan beberapa dampak positif yang di timbulkan seperti perusahaan PLTU membantu upacara ke-agamaan dengan cara melakukan pengada-an biaya sampai membantu memberikan edukasi gratis terhadap anak-anak dan masyarakat.³

Perbedaan penelitian kami dengan beberapa penelitian di atas adalah belum cukupnya penjelasan tentang keterlibatan pemerintah dalam mengatasi beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh PLTU, karena itu kami akan mencoba menjelaskan itu. Perbedaan lain adalah pemilihan lokasi yang berbeda.

TINJAUN TEORETIS

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, “*public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak

²Wiji Tri Wahyuni, “Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016), h. 97.

³Bayu Aji Prakoso, *et.al.* “Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Tanjung Jati B Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”, *Journal of Public Policy and Management*, Vol.5. No.2 (2016), h. 208-222.

melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Sementara itu, Thomas Dye men-definisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.⁴

Politik Lingkungan

Paterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan.⁵ Politik lingkungan juga bisa di maknai dengan penggabungan dalam satu frame yang diaman terdapat masyarakat lokal, ekosistem lingkungan, ekonomi, dan pemerintah yang saling berkaitan dalam sistem politik lingkungan.

Bryant dan Bailey dan Robbins yang melihat politik lingkungan sebagai alat

analisis dalam melihat relasi lingkungan dalam pespektif ilmu sosial. Bahkan lebih jauh Bryant dalam tulisannya yang lain juga menyebutkan tentang relasi kuasa, pengetahuan (lingkungan) dan juga politik lingkungan itu sendiri. Walaupun secara ringkas, Greenberg dan Park ketika membuka penerbitan *Journal of Political Ecology* di tahun 1994 mengatakan bahwa nalar politik lingkungan berangkat dari isu 'sains', 'sosial', politik ekonomi hingga politik lingkungan itu sendiri.⁶ Politik lingkungan menurut analisis Greenberg dan park di sebutkan bahwa hal yang perlu dikaji dalam politik lingkungan adalah ekosistem sosial masyarakat dan kultur yang melekat di masyarakat daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari observasi langsung, studi literatur dan melalui wawancara.

PEMBAHASAN

Perizinan dan Aktivitas Proyek

Pembangunan PLTU tentunya tidak terlepas dari perizinan oleh pemerintah atau pejabat desa setempat. Namun selain itu keikutsertaan masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam hal perizinan

⁴Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 35.

⁵Nur Hayati, "Inisiasi Aktor dalam Pemulihan Ekosistem Laut Bangsring di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Perspektif Politik Lingkungan", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 26.

⁶Cahyo Seftyono, "Rawa Pening Dalam Perspektif Politik Lingkungan: Sebuah Kajian Awal", *Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 3, No. 1 (2014), h. 7-15.

tentunya menjadi hal yang penting, pasalnya yang akan merasakan pengaruh dari pembangunan PLTU tentunya masyarakat sekitar, apalagi masyarakat yang mata pencahariannya akan ikut terpengaruh dengan limbah proyek.

Dalam hal perizinan tentunya tidak semua masyarakat menolak dan tidak semua masyarakat juga bisa menerima pembangunan proyek. Kelompok masyarakat yang menolak tentunya memiliki alasan tersendiri, salah satunya adalah kekhawatiran masyarakat atas kerusakan lingkungan yang akan disebabkan oleh pembangunan PLTU, belum juga masalah pembebasan lahan para petani yang akan menjadi lahan atau tempat dibangunnya proyek. Limbah dari hasil proyek menjadi salah satu alasan utama sebab hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut seperti merusak terumbu karang, kualitas rumput laut yang dapat merugikan petani rumput laut, serta ikan-ikan yang ikut terkontaminasi oleh limbah proyek yang dapat mengakibatkan kerugian untuk para nelayan.

Sedangkan untuk kelompok yang mendukung pembangunan proyek PLTU merasa bahwa hal ini akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat tentunya dalam hal perekonomian, seperti terciptanya lapangan kerja dan peluang-peluang usaha lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun meskipun demikian sebagai pemerintah desa perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat setempat sebelum memberikan izin terkait dampak yang akan ikut

dirasakan oleh warga yang tentunya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Lain halnya dengan proses perizinan yang dilakukan oleh pihak pengelola pembangunan PLTU di Desa Punagaya, Kabupaten Jeneponto. Desa Punagaya adalah desa yang menjadi tempat pembangunan PLTU yang lautnya terhubung langsung dengan Kelurahan Pantai Bahari dimana desa ini memiliki warga masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani rumput laut dan nelayan. Tentunya dampak pembangunan PLTU bukan hanya dirasakan oleh warga Desa Punagaya yang menjadi tempat pembangunan proyek tetapi juga warga Kelurahan Pantai Bahari juga ikut merasakan dampaknya. Dalam proses perizinan pemerintah Kelurahan Pantai Bahari tidak dilibatkan, padahal wilayah meraka pun akan merasakan dampak dari pembangunan proyek tersebut karena kedua wilayah administrasi ini dihubungkan oleh satu laut. Lurah Pantai Bahari, Muhammad Nasir mengatakan bahwa pihaknya sendiri sebagai pemerintah di tingkat kelurahan tidak dilibatkan alasan utamanya karena proyek tersebut tidak dibangun di atas lahan Kelurahan Pantai Bahari.

“Sejujurnya saya selaku pemerintah di sini, itu sama sekali tidak terlibat dalam pemberian izin pembangunan PLTU kare-

⁷Rahma Alifia Pramanik, Eko Priyo Purnomo & Aulia Nur Kasiwi, “Dampak Perizinan Pembangunan pltu Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan”, *Jurnal KINERJA*, Vol. 17, No.2 (2020), h. 249-250.

*na kami tidak memiliki kewenangan untuk hal itu, mengingat PLTU dibangun di Desa Punagaya yang lautnya terhubung dengan Kelurahan Pantai Bahari, namun tentunya kami juga pasti merasakan dampak dari pembangunan PLTU ini, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya”.*⁸

Pada dasarnya kegiatan PLTU di Jeneponto telah berdampak pada aktivitas warga dengan adanya mobil proyek yang lalu lalang setiap harinya. Selain itu, kegiatan proyek menghasilkan polusi udara yang tentunya dapat mengganggu kesehatan warga sekitar. Berdasarkan laporan Greenpeace menjelaskan bahwa pembakaran batu bara yang ada di PLTU menjadi proses terbentuknya hujan asam dan debu yang tidak baik bagi kesehatan dan perkembangan tumbuhan dan makhluk hidup di laut. Pembakaran batu bara dapat juga menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan manusia dan hewan. Bukan hanya, itu zat-zat berbahaya lainnya yang dihasilkan oleh kegiatan PLTU berpotensi mencemari lingkungan.⁹

Warga Kelurahan Pantai Bahari telah lama merasakan dampak tersebut, ditambah mobil truk yang lalu lalang mengakibatkan padatnya kendaraan di jalan dan kondisi jalanan yang sempit dan berlubang

membuat pengendara di jalan sulit menjaga keseimbangan ketika berkendara. Alhasil salah satu warga pernah tertabrak oleh kendaraan proyek saat tengah mengantar barang kebutuhan proyek. Hal ini disampaikan langsung oleh Lurah Pantai Bahari sendiri.

*“Kendaraan proyek PLTU itu sering lewat di kampung kami, karena jaraknya lebih dekat dibanding harus lewat jalan poros untuk masuk ke Desa Punagaya sendiri, akibatnya salah satu warga kami pernah ditabrak kendaraan proyek PLTU.”*¹⁰

Dampak Pembangunan PLTU

Limbah proyek PLTU merupakan salah satu penyebab perekonomian masyarakat menurun. Hal ini dikarenakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas proyek memiliki kandungan atau zat yang berbahaya bagi keberlangsungan pertumbuhan ekosistem laut, seperti molekul hidrokarbon yang dapat menurunkan kualitas udang dan ikan di laut. Dalam waktu yang cukup lama jika limbah ini terus mengalir ke laut terumbu karang dan ekosistem laut lainnya akan rusak. Oleh karena itu limbah yang dihasilkan oleh proyek dapat menjadi penyebab menurunnya pendapatan para petani rumput laut dan nelayan.¹¹ Seperti yang terjadi di Kelurahan Pantai Bahari, limbah yang dihasilkan oleh proyek PLTU menyebabkan menurunnya kualitas mutu

⁸Muhammad Nasir, Lurah Pantai Bahari, *Wawancara*, 10 Juni 2021.

⁹Fitriyanti Faruk & Indra Altarans, “Dampak PLTU Tidore Terhadap Lingkungan Udara, Kesejahteraan Dan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara”, *Jurnal Teknik*, Vol.13, No.2,(2020), h. 38-49.

¹⁰Muhammad Nasir, Lurah Pantai Bahari, *wawancara*, 10 Juni 2021.

¹¹Syefli Ewimia Darza, “Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia Terhadap Ekosistem Laut”, *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol.4, No.3, (2020), h. 1831-1852.

rumput laut para petani. Kualitas rumput laut yang tidak bagus harga jualnya juga pasti menurun, hal ini tentu saja berimbas pada pendapatan petani. Hal ini dikeluhkan oleh salah satu warga yang sudah merasa sangat dirugikan dan per-solan ini telah disampaikan ke pemerintah Kelurahan Pantai Bahari agar dicarikan solusi.

“Warga kami itu sudah mengeluhkan aktivitas proyek yang membuat rumput laut mereka jadi gagal bertumbuh, kadang juga kualitas rumput laut mereka tidak bagus padahal dulu sebelum tidak ada PLTU kualitas rumput laut mereka bagus, tapi sekarang setelah ada PLTU limbahnya mungkin yang sudah merusak kualitas rumput laut warga.”¹²

Untuk menguraikan lebih jauh, kami membagi ke dalam dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pembangunan proyek PLTU di Kabupaten Jeneponto. Adapun dampak positif pembangunan PLTU bagi masyarakat sekitar adalah (1) bertambahnya lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan dapat juga membantu perekonomian nasional mau pun perekonomian daerah sekitaran PLTU. (2) Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat Jeneponto. Namun dampak negatifnya, yakni: (1) Lingkungan hidup tercemar dikarenakan polusi yang ditimbulkan oleh asap dari PLTU tersebut, begitupun air laut ikut tercemar yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas rumput laut. Kualitas yang turun menyebabkan

harga jadi anjlok. Di sisi lain, nelayan semakin kesulitan menangkap ikan karena wilayah tangkapan semakin jauh. (2) Organisasi yang terdapat di Desa Punagaya, seperti kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan mendapat bantuan dari PLTU tetapi tidak merata. Hal ini dapat memunculkan kecemburuan antar kelompok. (3) Banyak masyarakat yang terkena penyakit gatal-gatal dikarenakan limbah pabrik yang di aruskan ke laut mengakibatkan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi di laut seperti nelayan ikan dan petani rumput laut terkena penyakit gatal-gatal, iritasi kulit, dan batuk berdahak. (4) Kenyaman masyarakat juga terganggu dikarenakan suara mesin pabrik yang begitu bising, begitupun cuaca bertambah panas.

Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak

Pemerintah adalah salah satu unsur paling penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dalam masyarakat diperlukan adanya otoritas tersendiri untuk bisa mengatur. Soekanto mendefinisikan peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.¹³

¹²Muhammad Nasir, Lurah Pantai Bahari, wawancara, 10 Juni 2021.

¹³Ima Maghfiro, “Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup

Sebagai pemerintah, kelurahan bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat di kelurahan tersebut serta bertanggungjawab melayani keluhan-keluhan masyarakat setempat akibat dampak pencemaran lingkungan oleh PLTU tersebut. Karena sebagian peneliti bertempat tinggal di dekat lokasi penelitian, jadi kami mempunyai beberapa informasi tambahan. Sebenarnya, pemerintah Kelurahan Pantai Bahari pernah mengadakan gotong royong yang melibatkan seluruh masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa guna membersihkan sampah dari pesisir pantai. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah karena sadar bahwa pantai atau laut adalah salah satu lahan yang paling sering digarap oleh masyarakat sekitar dikarenakan sangat berpotensi untuk membudidayakan komoditas rumput laut yang berjumlah banyak sehingga bisa memajukan perekonomian masyarakat setempat.

Namun program ini dirasa belum cukup oleh masyarakat dalam rangka mengatasi limbah PLTU. Bahkan dari hasil wawancara kami terungkap bahwa pemerintah belum menindak lanjuti keluhan-keluhan masyarakat atas dampak lingkungan yang diakibatkan PLTU. Lurah Pantai Bahari sendiri juga mengatakan bahwa belum ada upaya yang serius dan berkelanjutan dari pemerintahan yang lebih tinggi, seperti dinas lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak limbah yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.¹⁴

Kabupaten Jombang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.3 (2013), h. 94-102.

¹⁴Muhammad Nasir, Lurah Pantai Bahari, wawancara, 10 Juni 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadirnya perusahaan PLTU di Kabupaten Jeneponto menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang mendapat manfaat dari pembangunan PLTU, memiliki sikap yang pro. Sementara masyarakat yang dirugikan justru menolak kehadiran PLTU. Namun sesuai fakta lapangan bahwa hadirnya PLTU secara perlahan membunuh perekonomian masyarakat setempat karena sangat berdampak buruk pada ekosistem laut yang sebagian masyarakat bergantung hidup mereka di sana. Rumput laut yang dulunya tumbuh subur di daerah pesisir Pantai Bahari, kini kualitasnya semakin menurun akibat limbah dari PLTU. Begitupun wilayah tangkapan nelayan semakin jauh, karena ikan semakin menjauh dari wilayah tangkapan semula. Di sisi lain, pemerintah yang diharapkan meminimalisir dampak melalui kebijakan, justru kurang maksimal upaya yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Melinda Paula Tumbol, "Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten", *Skripsi* (Serang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).
- Wiji Tri Wahyuni, “Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016).
- Bayu Aji Prakoso, *et.al.* “Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Tanjung Jati B Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”, *Journal of Public Policy and Management*, Vol.5. No.2 (2016), h. 208-222.
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Nur Hayati, “Inisiasi Aktor dalam Pemulihan Ekosistem Laut Bangsring di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Perspektif Politik Lingkungan”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Cahyo Seftyono, "Rawa Pening Dalam Perspektif Politik Lingkungan: Sebuah Kajian Awal", *Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 3, No. 1 (2014), h. 7-15.
- Rahma Alifia Pramanik, Eko Priyo Purnomo & Aulia Nur Kasiwi, “Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan”, *Jurnal KINERJA*, Vol. 17, No.2 (2020), h. 249-250.
- Fitriyanti Faruk & Indra Altarans, “Dampak PLTU Tidore Terhadap Lingkungan Udara, Kesejahteraan Dan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara”, *Jurnal Teknik*, Vol.13, No.2,(2020), h. 38-49.
- Syefli Ewimia Darza, “Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia Terhadap Ekosistem Laut”, *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol.4, No.3, (2020), h. 1831-1852.
- Ima Maghfiro, “Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.3 (2013), h. 94-102.

Wawancara

Muhammad Nasir, Lurah Pantai Bahari, wawancara, 10 Juni 2021.

PETUNJUK PENULISAN

JURNAL VOX POPULI

1. Topik yang akan dipublikasikan oleh jurnal Vox Populi (Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Maassar) berhubungan dengan Politik Islam, Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Gerakan Sosial, Politik Lokal, Pemerintahan dan topik lain yang diangkat dalam skripsi mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin yang memuat unsur kebaruan, baik dalam bentuk kumpulan/akumulasi pengetahuan baru, pengamatan empirik atau hasil penelitian, dan pengembangan gagasan atau usulan baru.

2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris, belum pernah dipublikasikan serta bebas dari unsur plagiat.

3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman.

4. Jumlah kata berkisar 6000 - 8000 kata. Artikel yang jumlah kata lebih dari itu namun dianggap perlu diketahui oleh publik maka akan dipertimbangkan dan dimuat setelah mendapat persetujuan dari Tim Editor.

5. Tabel dan gambar harus diberi identitas yang berupa nomor urut dan judul tabel atau gambar yang sesuai dengan isi tabel atau gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.

6. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan teknis, mengadakan perubahan susunan naskah, memperbaiki bahasa dan berkonsultasi dengan penulis sebelum naskah dimuat.

5. Sistematika penulisan naskah, terdiri dari:

- **a. Judul**

Ukuran font untuk judul artikel adalah 18 point, dan font pada isi 12 point. Judul maksimal 12 kata dalam bahasa Indonesia atau 10 kata dalam Bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, lugas, tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas.

- **b. Nama Penulis, Institusi dan Email**

Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain, asal lembaga tempat penulis bernaung dan alamat *email* untuk korespondensi dengan ukuran 11 point.

- **c. Abstrak dan kata kunci**

Abstrak menggunakan kata kisaran 150-200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times New Roman 11point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

- **d. Pendahuluan**

Pendahuluan ditulis dengan Times New Roman 12 point. Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya, dan kontribusi yang diberikan dari makalah ini. Pendahuluan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, literatur-literatur yang relevan dengan dengan subjek penelitian, pendekatan yang akan digunakan, serta nilai kebaharuan yang akan dihasilkan. Bagian ini juga penulis mesti memberi argument tentang pentingnya penelitian dilakukan. Istilah-istilah asing dicetak *miring (italic)*.

- **e. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini semaksimal mungkin berisi uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **f. Tinjauan Teoretis**

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **g. Metode Penelitian**

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data. Metode penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi tanpa membuat sub bagian.

- **h. Hasil dan Pembahasan**

Bagian Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bagian ini diharapkan memberikan penjelasan ilmiah yang secara logis dapat menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil tersebut yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan.

Penulis menyusun secara sistematis disertai argumentasi yang rasional tentang informasi ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, terutama informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara ilmiah, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dapat berupa temuan baru atau perbaikan, penegasan, atau penolakan interpretasi suatu fenomena ilmiah dari peneliti sebelumnya. Untuk memperjelas penyajian, hasil penelitian disajikan secara cermat agar mudah dipahami, misalnya dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, kurva, grafik, gambar, foto, atau bentuk lainnya sesuai keperluan secara lengkap dan jelas.

- **i. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan tepat tentang apa yang diperoleh, memuat keunggulan dan kelemahan, dapat dibuktikan, serta terkait langsung dengan tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada bagian sebelumnya, bukan pernyataan yang sama sekali baru dan tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya, serta merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi.

- **g. Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam naskah. Cara penulisan disesuaikan dengan ***gaya selingkung Vox Populi***.

GAYA SELINGKUNG JURNAL VOX POPULI

CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*)-*Tidak menyertakan gelar akademik pengarang*

BUKU

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

ARTIKEL DALAM BUKU

¹Tom B. Bottomore, “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

ARTIKEL DALAM JURNAL

¹Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

ARTIKEL PADA MEDIA MASSA

¹Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

ARTIKEL DARI INTERNET

¹Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> diakses 31 Mei 2018.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

¹Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”, *Skrripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

DOKUMEN RESMI

¹Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden_\(pdf\)](https://www.bphn.go.id/data/documents_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden_(pdf)) diakses 1 Juli 2019.

WAWANCARA

¹Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

ATURAN PENULISAN *FOOTNOTE* BERULANG

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David & Julia, 1991, h. 189.

⁴Thandike, 2007, h. 680.

Catatan

- Jika mengutip sumber rujukan yang sama, cukup menulis nama depan pengarang, tahun dan halaman. (Begitupun jika terdapat nama pengarang yang sama dan hanya dibedakan tahun dan halaman).
- Namun jika terdapat nama pengarang yang sama dan tahun yang sama, maka cukup diberi kode “a” atau “b” setelah tahun penerbitan.
- **Contoh**

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991b), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Being Urban: A Sociology of City Life* (Chicago: Univesity of Chicago Press, 1991a), h. 10.

³David & Julia, 1991a, h. 189.

⁴David & Julia, 1991b, h. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Daftar pustaka mengikuti gaya penulisan *catatan kaki*, namun tidak menyertakan nomor halaman.
- Daftar Pustaka disusun secara alfabetis menurut abjad nama-nama pengarang.
- Jika ada dua atau lebih karya tulis dari pengarang yang sama, maka karya dengan tahun penerbitan paling awal yang ditempatkan lebih awal dalam daftar pustaka.